

LITERATURE REVIEW : MODEL ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
LITERATURE REVIEW : PUBLIC POLICY ANALYSIS MODELS

Eliane Eldora¹, Aries Wahyuningsih², Sandy Kurnia Jati³, Sindy Sabathina⁴

^{1,2,3}Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit ,STIKES RS Baptis Kediri

*Email: ¹elianeeldoraa20@gmail.com, ²aries.wahyuningsih@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan mengenai model analisis kebijakan publik dan menyajikan permodelan kebijakan dalam risalah kebijakan dan menentukan rekomendasi untuk pilihan kebijakan secara politis. Metode yang digunakan content analysis dengan melakukan penelusuran 5 ulasan dari leterature review benar dalam berbagai sumber jurnal di indonesia. Hasil literature review menguraikan bahwa model analisis kebijakan publik adalah sangat penting dilakukan semua masyarakat. Dalam model analisis kebijakan publik dapat dilakukan secara kompleks dengan memilih model analisis kebijakan publik yang tepat dan menentukan pemilihan model analisis berdasarkan penginputan permodelan dan objek kebijakan model analisis tersebut. Secara kesimpulannya dari 5 jurnal ini adalah Pemodelan kebijakan mesti dilakukan dengan input yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, sektor, dan lembaga dalam kerangka kerja sistem yang kompleks dalam persoalan input kebijakan yang dilalui mulai dari penetapan agenda, pengambilan keputusan, dan pilihan sarana tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa diimplementasikan kebijakan tersebut serta berkaitan dengan memosisikan Model analisis kebijakan dalam konteks sektor-sektor publik yang harus dikelola secara serius dan besarnya tingkat urgensi bagi pemerintah.

Kata Kunci: Model, kebijakan publik,pemerintah,analisis kebijakan

ABSTRACT

This study aims to analyze policies regarding public policy analysis models and present policy models in policy treatises and determine recommendations for policy choices politically. The method used is content analysis by searching 5 reviews from true literature reviews in various journal sources in Indonesia. The results of the literature review describe that the public policy analysis model is very important for all people. In the public policy analysis model, it can be done in a complex way by choosing the right public policy analysis model and determining the selection of the analysis model based on model input and the policy object of the analysis model. In conclusion, from these 5 journals, policy modeling must be carried out with input from various disciplines, sectors, and institutions within a complex system framework in terms of policy input, starting from agenda setting, decision making, and the choice of means cannot work. individually without implementing the policy and related to positioning the policy analysis model in the context of public sectors which must be managed seriously and the high level of urgency for the government.

Keywords: Models, public policy, government, policy analysis

Pendahuluan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dari asas yang digunakan secara garis besar adanya sebuah masalah. Rencana yang memiliki beberapa dasar dalam pembuatan untuk kemudian dipakai dalam bidang pekerjaan, perilaku bertindak, kepemimpinan hingga menangani masalah. Untuk kemudian kebijakan yang dikeluarkan bakal dipakai sebagai pedoman aturan bertindak. Kebijakan publik adalah aturan yang sudah disepakati untuk dikeluarkan untuk kemudian dipakai mengatur orang hingga kelompok serta pejabat. Tujuan adanya kebijakan publik atau *public policy* dalam memecahkan masalah yang muncul atau juga sedang dihadapi. Pengertian kebijakan publik sebenarnya memiliki banyak penjelasan dan terbatas dari kebijakan lainnya. Jika dilihat secara terminologi, arti kebijakan publik memang diketahui banyak dan kebanyakan tergantung dari sudut mana seseorang mengartikannya. Kebijakan publik termasuk sebagai kewenangan milik pemerintah, dilakukan dalam menjalankan tugas serta fungsi dalam hubungan yang terjadi di dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Model analisis kebijakan publik menggunakan metode *content analysis* dengan menggunakan telusuran *literature review* secara integrasi dari berbagai sumber dari jurnal yang ada di Indonesia. Tujuan dari *literature review* adalah untuk mengetahui landasan apa yang mendukung dalam memecahkan masalah yang diteliti. Teori yang digunakan merupakan langkah awal agar peneliti dapat memahami permasalahan yang ada dengan tepat sesuai dengan kerangkanya. Untuk mendapatkan gambarannya yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah terjadi dalam model kebijakan publik yang diterapkan oleh pihak pemerintah sebelumnya.

Hasil

Tabel 1 Ekstrasi dari literature Review 5 Jurnal

Autor	Tahun	Judul	Metode	Hasil penelitian	Database dan Reputasi
Ronawaty Anasiru	2011	Implementasi model kebijakan Penanggulangan Anak jalanan di Kota Makassar	Desain :Deskritif kualitatif Variabel : implementasi model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan di Kota Makassar Instrumen: Observasi dan wawancara	Menunjukkan balai Balai Besar Pendidikan danPengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta tahun 2006, isu anak jalanan	Jurnal Administrasi Publik Vol 16,no 4
A. Syamsu Alam	2009	Analisis kebijakan publik kebijakan sosial di perkotaan sebagai kajian implementatif	Desain: Deskritif Variabel : Penanganan masalah pedagang kaki lima Instrumen : observasi	Makassar tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dinilai disamping kurang fokus/spesifik juga karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota dengan segala kemajuan dan perubahan yang telah terjadi	Jurnal ilmu pemerintahan Vol 2 no 1
Maria aprillia,Kis martini	2016	Analisis Kebijakan Publik Deliberatif dalam pembangunan daerah	Desain : deskritif kuantitatif Variabel : Targetnya adalah penurunan jumlah warga miskin sebesar 2 % setiap tahunnya. Instrumen : wawancara dan observasi	Pelaksanaan Kebijakan Publik Deliberatif dalam pembangunan di Kecamatan Semarang Utara difokuskan untuk menilai seberapa deliberatif Musrenbang diselenggarakan. Untuk mengetahuinya digunakan tiga kriteria yaitu Inclusion, Deliberation, dan Influence	Jurnal urnal Of Public Policy And Management Vol 5 no 4
Muhammad Chabibi	2019	Model analisis kebijakan publik dalam program beasiswa santri berprestasi	Desain : deskritif kuantitatif Variabel : model kebijakan Program Beasiswa Santri Berprestasi Instrumen : observasi	Berkaitan dengan Program Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) di pesantren terdapat studi evaluasi yang pernah dilakukan oleh Iyoh Mastiyah dengan menggunakan model evaluasi CIPP atau suatu model dengan cara melihat input, proses, output dan outcome dari program tersebut. Temuan studi ini adalah adanya relevansi antara implementasi PBSB dengan tujuan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.	Jurnal pemikiran islam kebijakan publik Vol 5 no 1

Andi Rahmat Hidayat, Alwi, Gita Susanti	2015	Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba)	Desain : kualitatif Variabel : Kebijakan masyarakat adat dapat dikategorikan sebagai kebijakan pemberdayaan (empowerment policy) sebab kebijakan ini akan memberikan kekuasaan terhadap komunitas masyarakat adat ammatoa berkaitan dengan wilayah dan hutan adatnya.	kebijakan pemberdayaan petani kakao di provinsi Sulawesi selatan masih menggunakan mekanisme birokrasi yang cenderung kaku dan rule oriented sehingga program kebijakannya masih tergolong proyek birokrasi dan tidak berorientasi murni pemberdayaan. Penelitian Gita Susanti(2013), bertujuan menganalisis sistem informasi dan koordinasi pelayanan pendidikan berbasis jaringan. Hasil penelitian ini menunjukkan ketidakberhasilan Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) menentukan strategi pelayanan pendidikan berbasis jaringan di kota Makassar	Jurnal analisis kebijakan dan analisis pelayanan publik Vol 1 no 2
---	------	---	--	--	---

Pembahasan

A. Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan

Salah satu masalah sosial yang terkait dengan kebijakan publik bidang kesejahteraan sosial adalah masalah anak jalanan yang menjadi sorotan publik dan perlu mendapat perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk menanggulangnya. Permasalahan sosial tersebut merupakan masalah publik yang mendesak untuk ditangani melalui suatu pendekatan pelayanan yang transparan dan akuntabel. bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan anak jalanan di Kota Makassar, kebijakan penanggulangan, implementasi kebijakan, mengenali faktor pendukung dan penghambat model-model kebijakan penanganan serta mencari alternatif penanggulangan untuk menjangkau hasil yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan model studi kasus. Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan

Administrasi negara dan kebijakan publik memperkenalkan berbagai model pembuatan kebijakan, yang sebenarnya merefleksikan pula model proses kebijakan dalam arti dan lingkup definisi kerja. Dalam hubungan itu dapat diidentifikasi antara lain model kelembagaan (kebijakan dipandang sebagai kegiatan lembaga pemerintah), model proses (kebijakan dipandang sebagai aktivitas politik), model elite (kebijakan dipandang sebagai preferensi elite), model kelompok (kebijakan dipandang sebagai konsensus kelompok), model rasional (kebijakan dipandang sebagai pencapaian tujuan secara rasional dan menjamin optimalitas social), model ikremental (kebijakan dipandang sebagai modifikasi kebijakan sebelumnya), dan model sistem kebijakan.

B. Analisis kebijakan publik sosial kajian implementatif

Kebijaksanaan menurut James E. Anderson (Solichin, 2003: 2), adalah sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Mengacu pada Hogwood dan Gunn, Bridgman dan Davis (2004) menyatakan bahwa kebijakan publik sedikitnya mencakup hal-hal seperti:

1. Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai.
2. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih.
3. Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah.
4. Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumberdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan.
5. Keluaran (output), yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu.

Kegiatan analisis kebijakan merupakan suatu keharusan bagi perumusan kebijakan, namun tidak terlalu ditekankan pada implementasi kebijakan dan lingkungan kebijakan, pada implementasi kebijakan dan lingkungan kebijakan biasanya dilakukan evaluasi. Namun demikian, evaluasi kebijakan merupakan bagian dari analisis kebijakan yang lebih bersifat berkenaan dengan prosedur dan manfaat dari kebijakan.

C. Analisis Kebijakan Deliberatif

LGSP-USAID menyatakan bahwa Musrenbang merupakan representasi dari proses perencanaan pembangunan yang bersifat deliberatif. Dimana prinsip-prinsip Good Governance diterapkan dalam perumusan kebijakan publik. Kota

Semarang sebagai salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu juga melaksanakan Musrenbang sebagai salah satu dari rangkaian proses perumusan kebijakan pembangunan. Pelaksanaan Kebijakan Publik Deliberatif dalam pembangunan di Kecamatan Semarang Utara difokuskan untuk menilai seberapa deliberatif Musrenbang diselenggarakan untuk mengetahuinya digunakan tiga kriteria yaitu Inclusion, Deliberation, dan Influence. Kriteria Inclusion atau Keterwakilan dipenuhi apabila Musrenbang yang dilaksanakan memiliki peserta yang mewakili seluruh kebutuhan masyarakat. Lyn Carson (2009) menyebutkan bahwa proses pengambilan kebijakan bisa dikatakan sangat representatif apabila dalam proses tersebut bermacam-macam kelompok dipertemukan melalui seleksi acak yang memungkinkan tercerminnya berbagai sudut pandang masyarakat. Kriteria deliberasi yang disampaikan oleh Carson mempunyai dua kata kunci penting, yaitu :access to information dan provide open dialogue. Akses informasi yang dibutuhkan dalam hal ini adalah informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Kriteria Influence dalam Musrenbang artinya adalah bahwa Musrenbang mampu mempengaruhi pembuat kebijakan. Artinya adalah aspirasi masyarakat yang disampaikan pada saat musrenbang mampu mempengaruhi kebijakan yang akan dihasilkan. Partisipasi masyarakat Kecamatan

Semarang Utara berada pada derajat Partisipasi semu. Pada tahap ini, telah ada proses komunikasi yang disertai negosiasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini tercermin dari adanya proses Pra-Musrenbang Kecamatan, dimana pemerintah Kecamatan dan masyarakat duduk bersama membahas usulan program. Keputusan yang dihasilkan dalam diskusi dihasilkan melalui kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan Pemerintah Kecamatan.

D. Model Analisis Kebijakan Publik Dalam Program Beasiswa Santri Berprestasi

Program Beasiswa Santri Berprestasi merupakan kebijakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI yang bertujuan untuk mempercepat ketertinggalan lembaga pendidikan pondok pesantren di bidang sains dan teknologi dengan tanpa melemahkan prinsip tafaqquh fiddin. Bidang-bidang yang ditawarkan kepada para santri meliputi ilmu kedokteran dan kesehatan, matematika, fisika, kimia, biologi, teknik, teknologi informasi, pertanian dan peternakan, agrobisnis, sosial humaniora, dan ilmu keislaman (islamic studies). Alumnus program ini diharapkan mampu menjadi pionir pengembangan masyarakat (community development) di lingkungan pondok pesantren. Tujuan dari diadakannya Program Beasiswa Santri Berprestasi di lingkungan pondok pesantren ini di antaranya adalah

1. pemberdayaan sosial untuk santri melalui memperluas akses bagi santri berprestasi yang memiliki kematangan pribadi, kemampuan nalar, dan prestasi untuk memperoleh pendidikan tinggi;
2. sebagai pemberdayaan sosial bagi pesantren melalui upaya peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) pondok pesantren di bidang sains, teknologi dan sosial kemasyarakatan agar dapat mengoptimalkan peranannya dalam pembangunan bangsa;
3. upaya pemberdayaan pesantren melalui penguatan pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pengembangan masyarakat dengan pembentukan jaringan kerjasama antara pendidikan tinggi dan pondok pesantren Melalui program PBSB ini diharapkan dapat mencetak kader-kader pondok pesantren sebagai alumni perguruan tinggi ternama mampu berkualitas serta berdaya saing di kancah nasional bahkan global serta mempunyai

komitmen lulus diwajibkan melakukan program lanjutan dari PBSB yang berupa pengabdian nyata dengan sekurang-kurangnya 3 tahun di lembaga pondok pesantren. Hal ini dikarenakan agar santri alumni PBSB yang berkualitas dapat menjadi aset yang berharga dari edukasi kementerian dan perguruan tinggi negeri bagi pesantren, masyarakat dan bangsa.

E. Model Jaringan Kebijakan Publik

Jaringan kebijakan diperlukan untuk menjawab problem sosial yang bersifat kompleks. Kebijakan pemberdayaan merupakan hal yang bersifat kompleks Kebijakan ini tidak tepat menempatkan target group hanya sebagai objek kebijakan melainkan harus menjadikannya sebagai subjek atau pelaku dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Konsep Network belakangan ini menjadi sebuah konsep yang banyak dibicarakan berbagai pihak, baik oleh pemerintah, ilmuan (social dan alam), praktisi bisnis, maupun oleh masyarakat secara umum. Dalam ilmu politik, kata "jaringan" sering digunakan baik oleh politisi maupun akademisi untuk menjelaskan pentingnya kehadiran stakeholders dari berbagai background.

Kesimpulan

Dari jurnal penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan yang dilaksanakan melalui model pendekatan berbasis panti sosial, model pendekatan berbasis keluarga, model pendekatan berbasis masyarakat. *Political will* serta kemauan keras pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Walikota Makassar dalam menanggulangi anak jalanan di Kota Makassar, merupakan faktor pendukung yang tentu saja perlu dukungan dari instansi. Pelaksanaan Kebijakan Deliberatif dalam Pembangunan Daerah di Kecamatan Semarang Utara belum sepenuhnya baik. Dari segi aspek inklusivitas, Pemilihan Peserta

Musrenbang tidak menggunakan sistem seleksi yang random karena keterbatasan Sumberdaya Manusia. Regulasi tentang keberadaan para PKL di kota Makassar sangat mendesak untuk ditinjau kembali, seiring dengan adanya perubahan tentang kemajuan kota. Sebuah kebijakan tidak lepas dari siklus perputaran kebijakan itu sendiri dari awal hingga pada akhirnya. Termasuk juga kebijakan beasiswa PBSB yang dilakukan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kemenag dimana output dan outcome selalu didekati dan dianalisis dengan evaluasi-evaluasi serta monitoring sebagai bahan materi dalam perbaikan kinerja dan penilaian kebijakan yang tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- A. Syamsu Alam, 2009, ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN SOSIAL DI PERKOTAAN SEBAGAI SEBUAH KAJIAN IMPLEMENTATIF, *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 1 Januari 2009*
- Maria Aprilia, Kismartini, 2014, ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DELIBERATIF DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KECAMATAN
- SEMARANG UTARA, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
- Muhammad Chabib , 2019, MODEL ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI KEMENAG, *Jawiyah Jurnal Pemikiran Islam Vol. 5, No. 1, Juli 2019*
- Muhammad Mujtaba Habib, 2015, ANALISIS PELAKSANAAN DESENTRALISASI DALAM OTONOMI DAERAH KOTA/KABUPATEN , *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 2, Agustus 2015*
- Ronawaty Anasiru, 2011, IMPLEMENTASI MODEL-MODEL KEBIJAKAN PENANGGULANGAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR, *Sosiokonsepsia, Vol. 16 No. 02, Tahun 2011*